

# KONTRIBUSI RESTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN LUWU

Hamzari

Alamat Korespondensi : hpalaguna@yahoo.com

## ABSTRACT

*This research aims to see how big contribution retribusi forestry towards region original income (PAD) at Kabupaten Luwu. This research is carried out April until June 2008 at area Kabupaten Luwu (Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan). Data that got to analyzed descriptively to detect how big tax contribution from forestry sector. Result that got to show that contribution retribusi from forestry sector as big as 1,50 flat percents - flat pertahun from regency region original revenue total luwu, while for realization retribusi forestry from target that determined as big as 26,91 flat percents - flat per year retribusi forestry not balance in realization every year it because target that determined every year it increase.*

**Key Word: region, original income**

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya pembangunan disegala bidang merupakan hal yang sangat penting. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya mengambil langkah – langkah kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan.

Hakekat pembangunan nasional ialah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan hakekat pembangunan adalah memanfaatkan sumber daya nasional yang cukup secara berencana, bertahap dan berkesinambungan. Pembangunan yang bertahap dilaksanakan harus nyata dan bertanggung jawab dalam artian bahwa pemerintah disatu pihak dan seluruh lapisan masyarakat dipihak lain harus berpartisipasi aktif dalam menunjang pelaksanaan pembangunan.

Kewajiban pemerintah dalam pembangunan meliputi penyediaan fasilitas berupa adanya sarana dan

prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun dalam melaksanakan aktivitasnya pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, karena pada dasarnya tersedianya dana merupakan hal yang sangat mutlak bagi keberhasilan suatu program pembangunan.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan di daerah adalah pajak dan retribusi. Oleh karena itu pelaksanaan dan pengolahannya perlu mendapat perhatian yang sungguh–sungguh dari pemerintah daerah agar hasil yang diharapkan dari pajak dan retribusi mencapai sasaran.

Retribusi sebagai sumber penerimaan yang cukup potensial di daerah, maka pelaksanaan pengolahannya perlu dikembangkan secara efisien dan efektif. Masalah tersebut bukan hanya merupakan masalah pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Asli Daerah tetapi merupakan masalah kita semua yang erat kaitannya dengan upaya pemupukan

dana untuk membiayai pengeluaran pembangunan daerah.

Salah satu jenis sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan yang sangat penting yang dikelola oleh pemerintah, khususnya Pemerintah kabupaten Luwu adalah dari sektor retribusi Kehutanan. Retribusi Kehutanan sebagai salah satu komponen dari retribusi daerah merupakan sumber penerima sangat potensial bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejalan dengan dibutuhkannya dana yang besar dalam pembangunan daerah, maka pelaksanaan pengelolaan retribusi Kehutanan perlu mendapat perhatian, mengingat bahwa masih banyak potensi yang dimiliki oleh daerah yang belum di kelola dengan baik selain retribusi Kehutanan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui realisasi penerimaan retribusi kehutanan di Kabupaten Luwu dan seberapa besar peranan retribusi kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Luwu . Waktu yang digunakan mulai dari pengumpulan data di lapang sampai dengan penulisan laporan adalah 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan April 2008 sampai Juni 2008.

Pengumpulan data dan informasi menggunakan alat tulis, perlengkapan lapangan lainnya seperti kalkulator dan kertas.

Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan pengamatan langsung.
- Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan

berupa literature ataupun laporan-laporan dari instansi terkait.

Data yang digunakan bersumber dari :

- Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu
- Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu
- Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu
- Instansi-instansi terkait yang dapat menunjang untuk berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Adapun metode analisa yang digunakan untuk penulisan ini adalah analisa deskriptif.

- Untuk melihat seberapa besar Kontribusi Retribusi Kehutanan Kab Luwu terhadap PAD digunakan rumus :

$$KKKL = \frac{RKL}{PAD} \times 100\%$$

Dimana :

KKKL = Kontribusi Retribusi Kehutanan Kab. Luwu terhadap PAD Kabupaten Luwu  
RKL = Retribusi Kehutanan Luwu  
PAD = Pendapatan Asli Daerah kabupaten Luwu

- Kesesuaian antara target dan realisasi penerimaan retribusi kehutanan, dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan rumus :

$$R = \frac{Y_{Pt} - Y_{Pt-1}}{Y_{Pt}} \times 100\%$$

Dimana :

R = Perkembangan realisasi penerimaan retribusi Kehutanan Kab.Luwu.  
 $Y_{Pt}$  = Retribusi Kehutanan Pada tahun t

$Y_{Pt-1}$  = Retribusi Kabupaten Luwu pada tahun t-1 (tahun sebelumnya).

barang yang dibutuhkan oleh penduduk daerah maupun daerah lain sehingga sebagai pelaku ekonomi yang dapat mengali dan mengembangkan potensi hutan yang ada untuk peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) melalui retribusi kehutanan .khususnya yang berasal dari hasil hutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keadaan Umum Wilayah

Selain faktor penduduk yang merupakan potensi dari keberadaan hutan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, maka luas wilayah merupakan potensi yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Keberadaan suatu wilayah yang luas akan memungkinkan penduduk untuk menghasilkan suatu

Luas wilayah mempunyai arti penting bagi pengembangan retribusi kehutanan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu tahun 2007

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Prosentase dari Luas Kab. Luwu
1.	Larompong	225,25	7.5
2.	Larompong Selatan	131,00	4.4
3.	Suli	235,25	7.8
4.	Belopa	59,24	1.9
5.	Kamanre	52,44	1.7
6.	Belopa Utara	34,73	1.1
7.	Bajo	134,82	4.5
8.	Bassesangtempe	301,00	10
9.	Latimojong	467,75	15.59
10.	Bupon	182,67	6.09
11.	Ponrang	207,07	6.9
12.	Bua	204,01	6.8
13.	Walenrang	94,60	3.1
14.	Walenrang Timur	63,65	2.12
15.	Lamasi	42,38	1.41
16.	Walenrang Utara	281,45	9.4
17.	Walenrang Barat	247,33	8.2
18.	Lamasi Timur	35,59	1.19
<b>Jumlah</b>		<b>3000.25</b>	

Sumber : Kantor Biro Pusat Statistik Kabupaten Luwu

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa luas wilayah Kabupaten Luwu sebesar 3.000.25 km<sup>2</sup>, yang tersebar atas 18 kecamatan. Kecamatan yang terluas wilayahnya adalah Kecamatan Latimojong dengan luas wilayah 467.75 km<sup>2</sup> atau sekitar 15,59%, disusul kemudian dengan Bastem dengan luas wilayahnya sebesar 301,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 10,00% dan kecamatan yang mempunyai luas wilayah terkecil adalah

Kecamatan Lamasi Timur dengan luas wilayah sebesar 35,59 km<sup>2</sup> atau sekitar 1.19%.dari luas kabupaten Luwu

### Sumber-sumber pendapatan asli daerah

Pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan memerlukan sumber dana yang jelas sehingga diperlukan upaya dari pemerintah. Salah

satu upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk memperoleh dana adalah mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri. Pihak pemerintah dalam hal ini menggali dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang salah satu diantaranya bersumber dari retribusi Kehutanan.

Selain retribusi Kehutanan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Luwu melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah terdapat beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah lainnya retribusi. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang saat ini dilaksanakan yang jenis sumber tersebut berasal dari retribusi kehutanan meliputi :

- a. Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM).
- b. Retribusi Izin Kepemilikan *Chain Saw/* Gergaji Rantai
- c. Retribusi Surat Izin Tempat Penampungan Kayu Terdaftar
- d. Retribusi Leges

### **Kontribusi Retribusi Kehutanan Terhadap PAD**

Pungutan retribusi kehutanan yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah perlu mendapat perhatian secara efektif dan efisien dari pemerintah. Sehubungan dengan itu ada beberapa bagian utama yang perlu dilakukan diantaranya :

- 1) Peraturan perundang – undangan Pelaksanaan dan pengelolaan pungutan retribusi kehutanan harus di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah. Peraturan perundang- undangan menjelaskan secara lengkap tata cara pelaksanaan pengelolaan retribusi kehutanan yang dimulai dengan

besarnya tarif yang dibayar sesuai dengan hasil hutan yang di kelola.

- 2) Sarana dan prasarana Keberhasilan dari pelaksanaan pungutan retribusi khususnya retribusi kehutanan selain didukung oleh adanya peraturan perundang-undangan juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, karena retribusi kehutanan merupakan sumber retribusi yang perlu mendapat perhatian untuk dikelola dan dikembangkan, agar dapat mendukung sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat menunjang peningkatan retribusi.

- 3) Jenis pungutan Jenis pungutan retribusi yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Luwu melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk memperoleh retribusi kehutanan diantaranya :

- a. Retribusi kayu bulat yang tarifnya berbeda berdasarkan diameter kayu yang dikelola, yang dikenakan kepada pemegang izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM).
- b. Retribusi Surat Izin Tempat Penampungan Kayu Terdaftar, yang dikenakan kepada penampung kayu olahan/kayu gergajian.
- c. Retribusi Surat Tanda Kepemilikan *chain saw/* Gergaji Rantai, dikenakan kepada pemilik gergaji rantai (*chai saw*).
- d. Leges untuk setiap surat izin dan surat lainnya yang dianggap perlu menggunakan leges.

Retribusi kehutanan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah dari beberapa sumber pendapatan lainnya. Retribusi kehutanan sebagai salah satu komponen dari retribusi daerah yang cukup potensial sebagai sumber pendapatan daerah. Realisasi penerimaan daerah yang berasal dari retribusi kehutanan pada Tabel 2.

Data pada Tabel 1 dibawah menunjukkan bahwa penerimaan retribusi kehutanan berfluktuasi pada setiap Tahun Anggaran. Realisasi retribusi kehutanan Pada Tahun Anggaran 2003/2004 sebesar 91,26%, tahun anggaran 2004/2005 naik menjadi 103,92%, Pada Tahun Anggaran 2005/2006 turun menjadi 98,70%, kemudian pada Tahun Anggaran 2006/2007 melonjak naik menjadi 138.67% dan pada Tahun anggaran

berikutnya kembali mengalami penurunan yakni pada Tahun Anggaran 2007/2008 hanya mencapai 37,55%. Penerimaan Retribusi kehutanan secara keseluruhan rata-rata sebesar 94,01%.

**Target, realisasi dan perkembangan Penerimaan Retribusi kehutanan**

Penerimaan dari retribusi kehutanan merupakan suatu sumber

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Daerah yang Berasal dari Retribusi Kehutanan Mulai Lima Tahun Anggaran Terakhir (Tahun 2003-2008)

Tahun Anggaran	Target Retribusi Kehutanan (Rp)	Realisasi Retribusi Kehutanan (Rp)	Prosentase (%)
2003/2004	120.000.000,00	109.507.500,00	91,26
2004/2005	75.500.000,00	78.463.200,00	103,92
2005/2006	115.000.000,00	113.501.250,00	98,70
2006/2007	225.000.000,00	312.006.750,00	138,67
2007/2008	360.000.000,00	135.180.570,00	37,50
<b>Rata – Rata</b>			<b>94,01</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.

Tabel 3. Target, Realisasi dan Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Kehutanan

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Perkembangan Realisasi	
			Jumlah Kenaikan (Rp)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
2003/2004	120.000.000,00	109.507.500,00	-	-
2004/2005	75.500.000,00	78.463.200,00	-31.044.300	-28,35
2005/2006	115.000.000,00	113.501.250,00	35.038.050	44,66
2006/2007	225.000.000,00	312.006.750,00	198.505.500	174,89
2007/2008	360.000.000,00	135.180.570,00	-176.826.180	-56,67
<b>Rata – Rata</b>				<b>26,91</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupetn Luwu

yang sangat potensial, jika dalam pelaksanaan pemungutannya dilaksanakan dengan baik dan diusahakan setiap sumber yang ada senantiasa dilakukan dengan penyesuaian. Target, realisasi serta perkembangan realisasi penerimaan dari

retribusi kehutanan dapat dilihat Pada Tabel 3.

Berdasarkan data pada Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa realisasi dari retribusi kehutanan yang dicapai dalam 5 (lima) tahun Anggaran adalah kecil, dimana terlihat pada tiap tahun realisasi

dari target retribusi kehutanan kadang menurun kadang naik atau melampaui target yang ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2003/2004 target yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 109.507.500,- atau pencapaian 91,25%, pada tahun 2004/2005 target yang ditetapkan sebesar Rp.75.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.78.463.200,- atau 103,92%, pada Tahun Anggaran 2005/2006 target yang ditetapkan sebesar Rp.115.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.113.501.250,- atau 98,69%, pada tahun anggaran 2006/2007 ditetapkan target sebesar Rp.225.000.000,- dan melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi Rp.312.006.750,- atau 138,67%. Pada tahun anggaran 2007/2008 target yang ditetapkan sebesar Rp.360.000.000,- dan realisasinya menurun yakni Rp.135.180.570,- atau hanya 37,55%.

Penerimaan retribusi kadangkala mengalami peningkatan, adapula mengalami penurunan. Realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2004/2005 tidak mengalami kenaikan oleh karena target yang ditetapkan lebih

kecil dari pada target pada Tahun Anggaran sebelumnya malah minus Rp.-31.044.300,- atau -28,35%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2005/2006 penerimaan retribusi mengalami peningkatan oleh karena target yang ditetapkan naik dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 35.038.050,- atau 44,66%, kemudian pada Tahun Anggaran 2006/2007 realisasi penerimaan meningkat pesat karena target penerimaan lebih dinaikkan yang sebelumnya yakni Rp.198.505.500,- atau 174,89%. Pada tahun anggaran 2007/2008 mengalami penurunan karena target untuk penerimaan ditambah sehingga realisasinya minus Rp. -176.826.180,- atau -56,67%. Jadi secara keseluruhan rata-rata pertahun realisasi penerimaan retribusi kehutanan sebesar 26,91%.

Sementara itu untuk mengetahui peranan retribusi kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) , maka terlebih dahulu diketahui perkembangan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun tahun ke tahun dengan melihat data yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Target, Realisasi dan Perkembangan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Perkembangan Realisasi	
			Jumlah Kenaikan (Rp)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
2003/2004	10.635.935.795,00	7.284.885.211,71	-	-
2004/2005	11.505.640.000,00	7.513.299.418,00	228.414.206,30	3,13
2005/2006	13.535.909.000,00	8.922.031.537,47	1.408.732.119,00	18,75
2006/2007	15.704.364.500,00	11.597.963.924,36	2.675.932.386,90	29,99
2007/2008	16.930.300.000,00	13.199.901.003,14	1.601.937.078,70	13,81
<b>Rata - Rata</b>				<b>13,14</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2004/2005 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 7.513.299.418,- dimana terjadi kenaikan sebesar Rp.228.414.206,30 atau 3,13 %

dari tahun anggaran 2003/2004. Pada Tahun Anggaran 2005/2006 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.922.031.537,47,- dengan jumlah kenaikan sebesar 1.408.732.119,00 atau 18,75%. Tahun

Anggaran 2006/2007 realisasi Pendapatan Asli Daerah kembali mengalami kenaikan sebesar Rp.11.597.963.924,36,- dengan jumlah kenaikan sebesar Rp.2.675.932.386,90 hanya sebesar Rp. 1.601.937.078,70 atau 13,81% dengan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 13.199.901.003,-. Jadi secara keseluruhan dalam tahun

atau 29,99% meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran 2007/2008 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga jumlah kenaikan menurun

**Peranan retribusi kehutanan terhadap PAD**

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah melalui penyederhanaan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah. Sejalan dengan hal tersebut, keduanya harus disesuaikan dengan kriteria yang ada. Sebelum dikeluarkan Undang-undang NO.18 Tahun 1997 yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah terdapat banyak jenis pajak retribusi daerah yang beberapa diantaranya mempunyai biaya yang diberikan wewenang melaksanakan dengan cara penyuluhan kepada masyarakat dan mitra pengusaha dibidang kehutanan akan pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pembangunan. Pemerintah daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber potensial

Anggaran realisasi Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 13,14% pertahun.

administrasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan hasil yang dicapai sehingga penerimaannya kurang memadai.

Pemerintah menyadari bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan bagian yang turut menentukan suksesnya pembangunan yang dilaksanakan, maka pemerintah mengusahakan agar tidak terjadi penurunan minimal mempertahankan nilai yang telah dicapai sebelumnya dengan jalan peningkatan pengawasan intensif dari pemerintah, khususnya kepada petugas

yang dimiliki oleh daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat dari tahun ke tahun. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu yang diperoleh dari realisasi penerimaan sektor kehutanan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Realisasi Penerimaan Retribusi Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Kehutanan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Prosentase (%)
2003/2004	109.507.500,00	7.284.885.211,71	1,50
2004/2005	78.463.200,00	7.513.299.418,00	1,04
2005/2006	113.501.250,00	8.922.031.537,47	1,27
2006/2007	312.006.750,00	11.597.963.924,36	2,69
2007/2008	135.180.570,00	13.199.901.003,14	1,02
Rata- Rata			1,50

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.

Pada Tabel 5 terlihat bahwa kontribusi retribusi kehutanan terhadap

Pendapatan Asli Daerah berfluktuasi , dimana pada tahun anggaran

2003/2004 kontribusi retribusi kehutanan sebesar Rp.109.507.500,- dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 7.284.885.211,- dengan sebesar 1,50%, tahun 2004/2005 perannya menurun menjadi 1,05%, selanjutnya pada tahun anggaran 2005/2006 peranan retribusi kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah 1,27%, kemudian pada tahun anggaran 2006/2007 naik menjadi 2,69% dan pada tahun anggaran 2007/2008 kembali menurun hanya sebesar 1,02%. Rata-rata kontribusi retribusi kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 5 (lima) tahun anggaran mengalami penurunan sebesar 1,50%.

Sektor retribusi kehutanan sangat berperan dalam menunjang Pendapatan Asli daerah sehingga potensinya harus lebih diperhatikan. Berfluktuasinya kontribusi retribusi kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah bukan karena realisasi penerimaan dari retribusi mengalami penurunan akan tetapi target yang ditentukan setiap tahunnya selalu meningkat serta kebijakan terhadap pemungutan retribusi. Namun tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang peranan retribusi kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin besar, jika faktor-faktor yang menjadi sumber dari retribusi kehutanan mendapat perhatian dari pemerintah sehingga retribusi kehutanan merupakan sumber yang sangat potensial bagi pemerintah.

#### **Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi kehutanan**

Kendala yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya penerimaan dari retribusi kehutanan antara lain :

1. Masih ada mitra atau pengelola hasil hutan yang tidak menyadari akan

pentingnya retribusi untuk pembangunan daerah.

2. Belum dikelolanya hutan secara optimal apabila melihat potensi hutan yang ada
3. Peraturan maupun ketentuan khususnya dibidang kehutanan serta kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan hutan.
4. Kesadaran perusahaan yang perlu ditingkatkan untuk peningkatan penerimaan retribusi.
5. Peran petugas di lapang serta penyuluh kehutanan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan retribusi pendapatan daerah sektor kehutanan adalah :

1. Pemerintah Daerah berusaha untuk mengelola dengan baik hutan yang ada namun terkendala oleh peraturan yang berhubungan dengan hutan dan kehutanan, dan birokrasi pengurusan legalitas sangat rumit.
2. Sosialisasi terhadap peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan Hutan dan Kehutanan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya retribusi kehutanan terhadap pembangunan.

#### **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah :

1. Dengan adanya aturan dan kebijakan serta birokrasi yang rumit serta sosialisasi yang kurang terhadap masyarakat dan mitra atau pengelola hasil hutan sehingga retribusi kehutanan cukup bila dipersentase, olehnya itu perlu peningkatan apalagi sektor kehutanan cukup potensial untuk dikembangkan.
2. Target dan realisasi serta perkembangan penerimaan retribusi kehutanan dapat dilihat

- dengan persentase perkembangan 26,91 Persen.
3. Untuk realisasi penerimaan retribusi kehutanan rata-rata pertahunnya sebesar 94,01 Persen.
  4. Kentribusi Retribusi dari sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 5(lima) tahun terakhir sebesar 1,50, Persen yang setiap tahunnya tidak tetap, oleh karena target yang ditetapkan berubah dari target sebelumnya.
  5. Dalam upaya peningkatan retribusi kehutanan walaupun Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam hal ini tetapi masih cukup kendala yang dihadapi, oleh karena masih kurangnya kesadaran para mitra atu pengelola hasil hutan, masyarakat, serta kebijakan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  6. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemahaman masyarakat terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan retribusi kehutanan terutama kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan PAD sektor kehutanan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Undang –Undang No 18 Tahun 1997 , **Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
- , Undang-Undang No.22 Tahun 1999 , **Tentang Pemerintahan Daerah.**
- , Undang-Undang No.41 Tahun 1999 , **Tentang Kehutanan .**
- , Undang-Undang No.34 Tahun 2002 , **Tentang Pajak dan Retribusi Daerah .**
- , Keputusan Bupati Luwu No. 23 Tahun 2004 , **Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah T.A. 2003**
- , Keputusan Bupati Luwu No.17 Tahun 2005 , **Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah T.A. 2004**
- , Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No.06 Tahun 2006 , **Tentang Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah T.A. 2005**
- , Keputusan Bupati Luwu No.30 Tahun 2007 , **Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah T.A. 2006**
- , Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Tahun 2008
- BPS Luwu 2007, Kabupaten Luwu Dalam Angka 2007
- Bahari,1990, **Perpajakan** , Edisi Ketiga , Cetakan Pertama , Liberty , Jakarta
- Brtodiharjo,1994, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Cetakan Kedua PT. Eresco Jakarta
- Departemen Kehutanan, 1992. **Manual Kehutanan.** Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Suparmoko,1996, **Keuangan Negara dan Teori Praktek** ,BPFE, Yogyakarta.
- Nurdjaman,Arsyad,dkk, 1992, **Keuangan Negara** Cetakan Pertama, Intermedia, Jakarta
- Poerwadarminta,WJS,1999, **Kamus Umum Bahasa Indonesia** Jakarta, Penerbit Balai Putaka
- Prawiramidjaja,RA.Rahman, **Keuanagan Negara dan Kebijakan**, Alumni Bandung
- Soedargo R,1960, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, NV. Eresco, Bandung
- Soemitro R, Rahmat, 1979 , **Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan**, NV. Eresco, Bandung